



Sumber: Kompas

Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan

Ariel Heryanto

Dalam setiap masyarakat ada satu atau beberapa gelintir istilah yang menduduki status sangat istimewa pada zamannya. Bukan saja istilah itu menyebar di mana-mana (seperti merek barang dagangan: Coca-cola, Levi's, Microsoft, Lux, atau Toyota), tetapi ia punya daya mobilisasi, daya-paksa, daya-pukau. Maka ia juga membangkitkan perdebatan dan tandingan.

Contohnya yang paling gamblang untuk Indonesia dalam seperempat abad belakangan adalah Pembangunan dan Pancasila. Keduanya dicetak dan dituturkan dalam jumlah tak terhitung. Yang lebih penting, keduanya menjadi dasar pemberar sejumlah keputusan dan tindakan besar yang berdampak hebat bagi kepentingan umum di negeri ini. Atas nama kedua istilah mukjizat itu dana dalam jumlah yang luar biasa dialokasikan secara tidak setara, bergantung pada prioritas. Penggusuran, pemutusan hubungan kerja, pembedilan, atau penembakan terhadap orang tidak bersenjata dapat dilaksanakan atas nama salah satu istilah kunci itu.

Seluruh kabinet negara di bawah pemerintahan Orde Baru dinamakan Kabinet Pembangunan. Orang nomor satu di negeri Orde Baru dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Sejumlah gedung, dokumen, organisasi dan acara maha penting ditempel ijin embel-embel Pancasila.

Namun sehebat-hebat sebuah kata-kunci, sifatnya fana. Ia punya masa kecil dan serba lemah sebelum berangkat dewasa dan menjadi perkasa. Ia juga tak mempan melawan kunyahan waktu, proses penuaan, dan mungkin kematian. Selagi berjaya, ia juga menyimpan masalah dari masa lalunya dan mengundang saingan pada masa kemudian.

Baik istilah Pembangunan maupun Pancasila bukanlah ciptaan Orde Baru. Tapi keduanya dinobatkan sebagai kata-kunci di bawah rezim ini. Di zaman sebelumnya, selama lebih dari dua dekade, kata-kunci yang tak kalah angker adalah Revolusi. Dan kini, ketika Pembangunan mulai memasuki pensiun, beberapa

istilah sedang bertanding untuk menjadi calon penggantinya. Globalisasi adalah salah satunya. Nilai-nilai Asia, Jatidiri Timur, Hak Asasi dan Demokratisasi adalah calon-calon lain.

Bagaimana dengan kedudukan istilah seperti Perempuan atau Keluarga di Indonesia? Keduanya tidak pernah dapat dianggap remeh, tetapi belum dapat dibilang mendekati posisi sebagai "kata-kunci". Masih belum apa-apa bila dibandingkan dengan kebesaran Pembangunan dan Pancasila.

Dalam jagad raya Pembangunan (sebagai bangunan wacana, tata berpikir, atau proyek yang sangat praktis) baik Perempuan maupun Keluarga tidak dihapuskan, tetapi dijinakkan dan dimanfaatkan. Perempuan dan keluarga diakui pertama-tama dan terutama sebagai asset, sumber daya, atau komponen yang penting. Baik Perempuan maupun Keluarga adalah sebagian kecil dari sebuah daftar panjang yang dapat dijadikan isi untuk sebuah master-narrative atau mantera utama yang sudah dipatok berbunyi "Peran... dalam menyukseskan Pembangunan"

Kalau Perempuan dan Keluarga mendapatkan tempat dalam rubrik Pembangunan, hal ini bukan karena ideologi Pembangunan bermurah-hati, penuh rasa kasihan, toleran atau liberal terhadap kemajemukan. Sesungguhnya, Pembangunan akan ambruk tanpa Perempuan/Keluarga. Pembangunan sangat bergantung pada Perempuan, juga pada Keluarga (yang sangat bergantung pada kepatuhan perempuan). Maka berbagai badan Pembangunan secara serius membuka berbagai kantor khusus yang mengurus persoalan Perempuan maupun Keluarga, seperti halnya ada kantor khusus urusan teknologi atau hutan.

Tetapi Pembangunan - dalam bentuk dan isi seperti yang sekarang - juga terancam ambruk jika penjinakkan Perempuan/Keluarga itu dibongkar blak-blakan atau jika sumbangan mereka diakui dan dihargai secara setimpal. Maka hubungan antara Pembangunan di satu pihak dan Perempuan/Keluarga di pihak lain membentuk sebuah paradoks. Ia mirip seks. Dianggap sangat penting dan sekaligus paling disembunyikan.

Paradoks senantiasa menyulitkan. Maka diperlukan sebuah cara untuk menutupi (bukan memecahkan, karena tak mungkin) paradoks ini. Seperti telah banyak dibahas kaum feminis, salah satu cara yang terbukti paling efektif adalah mengkampanyekan sebuah ilusi tentang terbelahnya kehidupan sosial ini menjadi dua: publik dan privat. Di berbagai negeri pasca-kolonial tidak ada istilah untuk keduanya, sehingga harus dipinjam dari bahasa bekas tuan-tuan penjajah.

Berkat kemujaraban ilusi itu, Pembangunan dan Keluarga dipisahkan secara tegas. Paradoks dalam hubungan mereka kadang-kadang dan seakan-akan lenyap. Pembangunan (sosial, ekonomi, maupun politik) dianggap berlangsung pada wilayah publik. Sedang keluarga dianggap sebagai urusan pribadi.

Dari pagi hingga sore, orang-orang (khususnya lelaki) bekerja di wilayah yang dianggap publik. Pulangnya ke rumah mereka digambarkan memasuki wilayah pribadi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi nasional yang sering dikutip-kutip dalam statistik Pembangunan dianggap tidak ada kaitannya dengan kerja mencuci, menjemur, menyetrika baju dalam para pejabat dan pegawai dinas Pembangunan di rumah-rumah tangga.

Seakan-akan stabilitas politik dan moneter negeri ini - atau bahkan seluruh kawasan Ekonomi Ajaib di Asia Tenggara - tidak ada kaitannya dengan stabilitas sehari-hari di rumah tangga yang berlangsung dalam bentuk kerja masak-memasak di dapur, mengasuh balita dan manula, mengepel lantai, atau membersihkan WC. Sebagian terbesar pekerjaan ini diselesaikan oleh para perempuan: sebagai babu, mertua, menantu, anak putri, adik/kakak putri atau keponakan putri.

Paradoks itu terbentang secara ekstrem bila dicampur dengan ilusi lain bernama nasionalitas. Ini yang dapat kita amati di kawasan Ekonomi Ajaib Asia Tenggara. Di sini terjadi ledakan hasil Pembangunan ekonomi yang membuat dunia berdecak-decak kagum. Yang lebih hebat, semua suskes kemilau ini terjadi seakan-akan - dan hanya seakan-akan - tanpa eksplorasi, tanpa pula kesenjangan sosial ekonomi. Pengemis tidak kelihatan di pusat-pusat kota. Apalagi pencopet atau pemogokan buruh. Para pemimpin negara itu mengaku prestasi itu sebagai miliknya. Dunia bertepuk tangan kepada mereka pula.

Rahasianya, sebagian besar pekerjaan yang kotor, melelahkan, membosankan, terhina, berbau, berbahaya, dan dibayar murah dikerjakan oleh orang berkebangsaan asing. Mereka menjalankan roda ekonomi yang paling dasar, tetapi sosok mereka tidak termasuk dalam gambar Pembangunan nasional karena mereka diimajinasikan sebagai orang asing. Ada yang bekerja di konstruksi bangunan, ada yang menjadi pembantu rumah tangga agar para majikan dapat bekerja penuh sebagai profesional di sektor publik.

Para pekerja yang paling berjasa meluncurkan Ekonomi Ajaib itu tidak mempunyai hak bersuara dalam masyarakat yang di negeri itu. Mereka tak punya perwakilan di parlemen. Satu-satunya hak mereka adalah gaji. Bila menuntut lebih dari itu dengan mudah mereka dapat diusir keluar negara majikannya. Ini tidak mungkin terjadi bila para pekerja itu direkrut dari bangsa sendiri.

Pembelahan dua wilayah publik/privat itu terbukti sangat efektif. Tetapi tidak secara sempurna. Berbagai tabir ilusi itu punya banyak lubang kebocoran. Ini tidak sepenuhnya berkat jasa para feminis dan ilmuwan yangkritis terhadap pembelahan ruang publik/privat. Sebagian dari kebocoran itu datang dari tingkah para pejabat negara sendiri.

Paling sedikit ada dua bentuk tingkah negara yang

secara amat gamblang merongrong ilusi pembelahan publik/privat dan Pembangunan/Keluarga. Pertama, negara tidak membekali warga masyarakat membina keluarga secara mandiri dan bersifat pribadi. Dalam berbagai bentuk, negara mencampuri teramat jauh wilayah pribadi yang dinamakan lembaga Keluarga. Termasuk dalam kehidupan seksual (kontrasepsi hanyalah sebintik contoh kecil). Keluarga menjadi sebuah proyek hasil rekayasa negara. Bukan sebuah tradisi yang spontan dan alamiah atau sekedar pesan Tuhan. Bukan sebuah suaka yang bersifat pribadi.

Kedua, negara menggunakan sebuah gambaran keluarga yang di-ideal-kan dan sekaligus di-alamiah-kan untuk dijadikan model dalam tata-politik baik dalam negeri mau pun antar-bangsa. Tata negara dalam negeri, biasanya yang otoriter, diibaratkan sebagai sebuah keluarga dengan sosok dan watak tertentu: satu ayah, satu ibu, beberapa anak, dan kepatuhan anak/ibu pada ayah! Dengan demikian tata-politik sebuah republik yang mengaku modern (bersifat kontrak rasional sehingga diperlukan Pemilihan Umum) hendak di-primordial-kan sebagai sebuah takdir atau gejala alam yang berada di luar analisa kritis (kita tidak pernah dapat memilih ayah/ibu- atau anak-kandung sendiri). Lagi pembelahan publik/privat dan Pembangunan/Keluarga dikhianati.

Curangnya, campur-tangan dari luar terhadap keluarga yang dibenarkan negara tidak diberlakukan secara konsisten. Hubungan antar-bangsa dianggap sebagai sebuah RT di sebuah perkampungan. Masing-masing anggota dianggap punya kedaulatan yang tak boleh dicampuri pihak lain. Dengan demikian pelecehan dan kekerasan domestik dianggap boleh dilakukan oleh yang mengaku bertindak sebagai ayah dalam negara terhadap yang dianggap sebagai ibu, adik perempuan, atau pembantunya. Ini dianggap "urusan dalam negeri" masing-masing negara.

Memahami kedudukan Perempuan dalam Pembangunan (pada seperempat abad ini), Revolusi (seperempat sebelumnya), atau Globalisasi (seperempat abad berikutnya) menutut kajian serius pada sosok dan aktivitas Keluarga sehari-hari serta bagaimana sosok dan aktivitas itu dikisahkan sebagai sesuatu yang lain. Kita bersyukur sudah mulai banyak penulis feminis yang membantu kesadaran kita akan hal ini. Semoga ini hanya sebuah awal dari pengkajian yang akan menjadi jauh lebih panjang, seru, dan mendalam.

Perlawan terhadap dominasi sebuah istilah kunci tak dapat dianggap enteng. Re-konstruksi istilah tandingan Perempuan merupakan sebuah contoh pilihan strategis meneman de-konstruksi Wanita. Hasilnya sudah kelihatan. Tapi kita harap ini baru merupakan sebuah warming-up untuk sebuah de-konstruksi berskala lebih besar yang menohok kabel utama yang mengaitkan dan sekaligus menyangkal kaitan Pembangunan/Globalisasi dengan Keluarga.